

Tinjauan Buku

POLITIK BAHASA

Heryanah¹

Judul Buku : Politik Bahasa
Penulis : Hasan Alwi dan Dendy Sugono
Cetakan :
Penerbit : Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional
Pencetak :
Tebal : xvii+246 hlm: 21 cm

Hasan Alwi dan Dendy Sugono (ed): Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta 2000

Language is also a medium of domination and power
(Jurgen Habermas, 1967: 287)

Bahasa sebagai alat komunikasi adalah definisi yang sangat sederhana, dan diketahui banyak orang, tapi dibalik itu banyak dimensi yang berhubungan dengan bahasa, seperti ungkapan dari Habermas di atas. Mempelajari bahasa tidak bisa dilepas dari mempelajari masyarakat penuturnya. Menurut Chaedar Alwasilah ada hubungan-hubungan yang kompleks antara masyarakat dan bahasa (Alwasilah, 1989 : 1).

Bahasa Indonesia yang berdasarkan Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan tahun 1954 dinyatakan sebagai bahasa nasional, mengalami dinamika perkembangan. Bahasa yang dijadikan bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, hal itu karena bahasa Melayu sudah sejak dulu menjadi *lingua franca* atau menjadi bahasa pergaulan antar etnik di nusantara.

Sampai akhir abad ke-19 bahasa Melayu mengalami proses penyebaran ke berbagai pantai di kepulauan Indonesia. Penyebaran dan standarisasi bahasa Melayu semakin maju dengan didirikannya Balai Pustaka dan kemudian dicetuskannya sumpah pemuda tahun 1928. Beberapa tahun kemudian pengarang-pengarang yang tergabung dalam Pujangga Baru mulai mengembangkan ragam kepastakaan dalam tubuh bahasa Melayu modern itu. Sejak proklamasi kemerdekaan, bahasa Melayu secara resmi menjadi bahasa Indonesia, dan proses standarisasi, estetikanisasi, intelektualisasi dan penyebaran fungsi bahasa Indonesia semakin bertambah pesat (Poedjosoedarmo, 1980 : 191).

¹ Peneliti pada Puslit. Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI

Perkembangan terus berlanjut, Kongres bahasa Indonesia pun diselenggarakan dan dinyatakan sebagai peristiwa nasional. Betapa pentingnya peran bahasa terutama di Indonesia sehingga banyak diadakan bermacam acara nasional mengenai perkembangannya, sebut saja Kongres Bahasa Indonesia yang telah diadakan sampai yang terakhir kali pada tahun 1998 (Kongres Bahasa Indonesia ke VII), Bulan Bahasa, Seminar Politik Bahasa dan acara-acara lain yang berhubungan dengan bahasa.

Permasalahan bahasa di Indonesia tidak hanya menyangkut perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, tapi juga hubungannya dengan bahasa-bahasa daerah yang merupakan bahasa ibu dari penutur etnisnya dan juga bahasa asing. Mulailah kemudian penelitian-penelitian mengenai bahasa marak dilakukan. Permasalahan mengenai bahasa sedemikian kompleksnya sehingga masih dirasa sangat perlu untuk mengadakan Seminar Politik Bahasa Indonesia.

Buku yang disusun oleh Pusat Bahasa ini merupakan *proceeding* (risalah sidang) dari hasil Seminar Politik Bahasa Indonesia yang diselenggarakan di Cisarua Bogor Jawa Barat pada tanggal 8-12 November 1999. Buku ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama sambutan dari Menteri Pendidikan Nasional dan Laporan Kepala Pusat Bahasa. Bagian kedua adalah penyajian makalah yang berjumlah 13 buah berikut transkrip tanya jawab, dan bagian ketiga rumusan hasil seminar dan menjadi Kebijakan Bahasa Nasional.

Tiga belas peserta yang membawakan makalah adalah para ahli dari berbagai bidang, walaupun ternyata hal itu lebih didominasi dari kalangan pendidikan dan ahli bahasa. Makalah yang mereka bawakan secara garis besar dapat diklasifikasikan ke dalam 3 pokok bahasan, yaitu:

1. kedudukan dan fungsi bahasa.
2. mutu dan peran bahasa.
3. mutu pemakai bahasa.

Seminar Politik Bahasa ini merupakan kelanjutan dari Seminar Politik sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menelaah dan merumuskan kembali hasil Seminar Politik Bahasa Nasional yang pernah diadakan tahun 1975 dan untuk memperkuat putusan Kongres Bahasa Indonesia VII tahun 1998. Hasilnya dirumuskan sebagai Kebijakan Bahasa Nasional yang menjadi pedoman dalam pengelolaan masalah kebahasaan di Indonesia.

Makalah yang dibawakan oleh para penyaji melingkupi banyak aspek bahasa, yang jika ditarik ke atas semua membahas permasalahan kebahasaan di Indonesia yang saling berkaitan; antara bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan persatuan dengan bahasa-bahasa daerah yang menjadi bahasa ibu penutur etnisnya dan juga bahasa-bahasa asing yang hidup di Indonesia. Selain itu dibahas juga perkembangan yang meliputi sastra (baik itu sastra Indonesia, sastra daerah dan sastra asing), penggunaan bahasa di media, peningkatan mutu pengajaran bahasa di sekolah, dan mengenai fungsi Pusat Bahasa.

Pembahasan mengenai bahasa Indonesia masih seputar fungsi dan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Dalam kurun waktu seperempat abad antara Seminar 1975 dan Seminar 1999, fungsi Bahasa Indonesia memperlihatkan kecenderungan perubahan, terutama fungsinya sebagai bahasa negara yang akhirnya membawa perubahan pula pada fungsi bahasa daerah dan bahasa asing. Fungsinya sebagai bahasa pengantar resmi dalam dunia pendidikan, sebagai bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional, dan sebagai bahasa resmi dalam pembangunan kebudayaan dan pemanfaatan iptek modern telah mengakibatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berpacu dalam menata dan megembangkan diri agar tetap berperan sebagai sarana komunikasi dalam berbagai bidang.

Bambang Kaswanti Purwo yang banyak menulis tentang permasalahan bahasa, dalam seminar itu membawakan makalah mengenai peningkatan mutu pengajaran bahasa. Ia menjabarkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang diasosiasikan sebagai bahasa yang baku, dan penggunaan bahasa Indonesia yang bersifat informal tapi merupakan bahasa yang hidup di masyarakat. Kemudian yang terjadi adalah permasalahan 'baik dan benar' dalam berbahasa. Ada bahasa yang baik dan benar di dalam kaidah ketatabahasaan Indonesia tapi itu menjadi bahasa yang kaku dan tidak populer digunakan di masyarakat terutama kalangan anak muda. Perhatian untuk mengembangkan 'bahasa baku' dilakukan seiring dengan perlakuan yang sama (tidak menganaktirikan) terhadap bahasa sehari-hari (informal).

Eep Saefullah Fatah khusus membahas mengenai Otoritarianisme dan Distorsi Bahasa. Penghianatan terhadap kata-kata telah diperlakukan sebagai salah satu senjata otoritarianisme Orba (Benedict R.O.G. Anderson). Ada 2 modus penggunaan kata sebagai senjata otoritarianisme Orba, yaitu: pertama, manipulasi dan eufemisme (hal-hal buruk dikaburkan sebagai sesuatu yang tidak terlampau buruk). Kedua, melarikan diri dari pokok persoalan. Penghianatan terhadap kata-kata telah menjadi warisan Orba yang mencemaskan. Ia telah menyebarkan sejenis virus berbahaya di tengah-tengah masyarakat dan menciptakan sebuah penyakit kronis, yaitu sindrom ketidakpercayaan pada kata-kata.

Pembahasan mengenai bahasa-bahasa daerah juga menjadi hal menarik dalam buku tersebut, terutama dikaitkan dengan isu semakin terancamnya eksistensi bahasa daerah-daerah tertentu akibat kehilangan penuturnya. Secara khusus masalah itu dibahas oleh Mahsum dari Universitas Mataram Lombok dalam makalah yang berjudul "Bahasa Daerah Sebagai Sarana Peningkatan Pemahaman Kondisi Kebhinekaan Dalam Ketunggalikaan Masyarakat Indonesia ke Arah Pemikiran Dalam Mereposisi Fungsi Bahasa Daerah". Dalam makalahnya, ia mengutarakan kekhawatiran tentang kelangsungan hidup bahasa-bahasa daerah karena semakin mendominasinya pemakaian Bahasa Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan dan juga sikap penutur bahasa daerah yang kurang positif terhadap bahasa daerahnya. Sikap ini disamping disebabkan oleh

penutur bahasa daerah yang relatif kecil jumlahnya, juga karena memandang rendah dirinya sebagai kelompok minoritas yang kurang berprestise (hal 39).

Punahnya bahasa daerah tertentu juga menjadi kekhawatiran banyak orang. Seperti yang diberitakan di harian Kompas (*Kompas*, 24 Januari 2003) seorang PNS bernama Darwin Peranginangin, dari kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, membuat sebuah kamus Karo. Laki-laki kelahiran Buah Rejo, Tanah Karo, Sumatera Utara ini khawatir bahwa generasi Karo berikutnya akan makin terasing dari bahasa daerah mereka, terutama generasi yang tumbuh di luar wilayah Karo.

Hal serupa juga dialami oleh bahasa-bahasa daerah di wilayah lain, misalnya saja bahasa Dayak. Bahasa Dayak berjumlah ratusan dan sangat berbeda satu sama lain. Pelestarian bahasa-bahasa Dayak semakin memprihatinkan mengingat generasi muda Dayak semakin banyak yang berorientasi ke luar komunitasnya dan telah banyak melakukan kawin campur (Bamba, 2002 dalam Jurnal ATL, No. 8 Vol. 7, 2002). Apalagi kebijakan pemerintah selama ini lebih terfokus pada pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan persatuan. Belum lagi yang dialami bahasa-bahasa daerah di wilayah Indonesia lainnya, yang jumlah penuturnya relatif sedikit, seperti bahasa-bahasa di Papua.²

Dalam makalah yang dibawakan oleh Mahsum disebutkan akan semakin banyak jumlah bahasa daerah yang akan masuk dalam kotak kategori bahasa *moribund* dan *endangered*.³

Pembahasan mengenai Bahasa asing berkaitan dengan era globalisasi. Peranan Bahasa Asing (terutama Inggris) semakin dirasakan penting terutama dalam berhubungan dan komunikasi antar bangsa. Di sisi lain perlu usaha untuk terus menguatkan posisi bahasa Indonesia sehingga tidak akan tergeser kedudukannya oleh bahasa asing. Dari beberapa makalah terlihat juga ada keinginan yang kuat beberapa penyaji untuk terus memodernkan bahasa Indonesia dan meningkatkan mutu pengajarannya di sekolah sehingga kelak dapat bersaing dengan bahasa asing.

Fungsi Pusat Bahasa juga dibahas dalam seminar ini. Ada beberapa makalah yang mempertanyakan peran Pusat Bahasa di era reformasi ini, karena pada jaman Orde Baru lembaga ini digunakan sebagai sarana kontrol hegemonik rejim ini. Dalam makalah terakhir dibahas

² Di Papua berdasarkan tabel yang dikutip dari Barbara Grimes F, ed, "Languages of the World." *Ethnologue* 1984 terdapat variasi bahasa terbesar (233 bahasa), terdapat bahasa-bahasa dengan jumlah penutur sebanyak 100 orang atau malahan kurang dari itu. (Makalah EKM. Masinambow, "Kebudayaan Dalam Pengembangan Bahasa Nasional.")

³ Klasifikasi ini dikemukakan oleh Michael Krauss dalam tulisannya "*The World's Language In Crisis*," *Language* vol. 68, 4-10 yang membuat pengelompokan bahasa berdasarkan gejala umum yang terjadi pada bahasa-bahasa di dunia, seperti jumlah penutur, prestise sosiokultural, dan dukungan pemerintah terhadap pemakaiannya, atas tiga kelompok.

mengenai fungsi dan kedudukan Pusat Bahasa. Pusat Bahasa⁴ mempunyai tugas untuk menangani masalah kebahasaan dan kesusastraan di Indonesia melalui kegiatan penelitian, pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra berdasarkan kebijakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Kekurangan buku ini terasa karena lebih banyak didominasi oleh pembahasan (murni) bahasa dan pengembangan serta perbaikan mutu pengajarannya di bidang pendidikan. Hal itu juga terlihat dari para pembicara yang kebanyakan dari kalangan pendidik dan ahli bahasa sehingga keterkaitan antara bahasa dengan masyarakat, politik dan budaya dari penuturnya kurang disentuh. Membaca buku ini terasa seperti membaca buku teks pelajaran sekolah tingkat menengah, karena banyak menyuguhkan format dan wawasan resmi⁵ (kecuali beberapa makalah, seperti yang dibawakan Eep Saefullah Fatah, Mahsum dan Bambang Kaswanti). Belum terasa adanya keinginan untuk mereformasi kebijakan politik bahasa dalam buku tersebut, padahal seminar itu diadakan setelah Era Reformasi bergulir. Jika dilihat dari hasil seminar ini yang akan menjadi Politik Bahasa, seharusnya pembahasannya lebih di arahkan ke realita kehidupan berbahasa, selain itu dalam buku ini terasa sekali yang lebih diutamakan untuk dikembangkan adalah Bahasa Indonesia sementara bahasa daerah, terutama bahasa-bahasa daerah yang dikhawatirkan punah kurang mendapat perhatian serius.

Lepas dari segala kekurangannya, buku ini cukup menarik dibaca untuk mengetahui perkembangan mengenai bahasa (terutama bahasa Indonesia) yang terjadi belakangan ini di Indonesia. Apalagi di bagian akhir buku terdapat rumusan tentang Politik Bahasa⁶ yang dapat menjadi acuan pemerhati bahasa, baik untuk dijadikan pedoman maupun kritikan bagi perkembangan bahasa di masa yang akan datang.

⁴ Pusat Bahasa sebelumnya bernama Pusat Pembinaan Bahasa dan Pengembangan Bahasa.

⁵ Istilah ini saya ambil dari tulisan Ariel Heryanto yang mengkritik acara-acara semacam Bulan Bahasa. Dia menyebut acara ini sebagai proyek dan ritual perayaan karena diadakan kurang lebih dengan semangat dan kerangka memeralat bahasa/sastra sebaik-baiknya bagi proyek pemerintah Orba yang disponsori oleh berbagai lembaga internasional dan disebut 'pembangunan' (Ariel Heryanto, "Bahasa Dan Kekuasaan: Tatapan Posmodernisme," dalam Bahasa Dan Kekuasaan: Politik Wacana Dipangung Orde Baru, Penerbit Mizan, 1996, hal 94.

⁶ Politik Bahasa adalah "kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengarahkan perkembangan bahasa".

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Puar, Yusuf (ed), 1980, *Setengah Abad Bahasa Indonesia*, Jakarta, Penerbit Idayus.
- Alwasilah, Drs. A. Chaedar, 1989, *Sosiologi Bahasa* Cet.3, Bandung, Penerbit Angkasa.
- Bamba, John, 2002, "Pluralisme Bahasa Dayak di Kalimantan Barat: Pengalaman Penelitian Institut Dayakologi," dalam *Jurnal ATL* No. 8 Vol. 7, Desember 2002.
- Latif, Yudi dan Idi Subandy Ibrahim (ed), 1996, *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*, cet. 1. , Bandung, Penerbit Mizan.
- Masinambow, EKM., (tahun tidak terdeteksi), *Kebudayaan Dalam Pengembangan Bahasa Nasional* (bahan kuliah)
- Poedjosoedarmo, Dr. Soepomo, 1980, "Interfensi dan Integrasi Dalam Situasi Keanekabahasaan," dalam *Setengah Abad Bahasa Indonesia*, 1980, Jakarta, Penerbit Idayus.
- Jurnal ATL* No. 8 Vol. 7, Desember 2002.
- Kompas, 24 Januari 2003